



## Hubungan Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Jawa Barat

Victor Amanusa Talakua<sup>1)</sup>, Johanis M. Tetelepta<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

<sup>1)</sup>vickyambon75@gmail.com

### Abstract

*This study aims to analyze the relationship between the internal control system and the accountability of financial management in Regional Apparatus Organizations of West Java Province. The research method uses a quantitative approach with a correlational design through the distribution of questionnaires to 98 respondents from 35 OPDs with budgets exceeding 50 billion rupiah. The data analysis technique uses descriptive statistics and simple linear regression with the assistance of SPSS version 26. The results of the study indicate that the implementation of the internal control system in West Java Province OPDs falls into the good category with an average score of 4.03, while the level of financial management accountability is also in the good category with an average score of 4.04. Hypothesis testing resulted in a calculated t-value of 14.762 with a significance of 0.000, proving that the internal control system has a positive and significant effect on financial management accountability. The coefficient of determination of 0.642 indicates that the internal control system is able to explain 64.2 percent of the variation in financial management accountability. This study concludes that improving the quality of the implementation of the internal control system will enhance the accountability of regional financial management, thus continuous strengthening of the five components of the internal control system is required, especially in the aspects of monitoring and risk assessment.*

**Keywords:** Internal Control System, Accountability, Regional Financial Management

Received by the Editorial Team: 17-12-2025 | Revised Completed: 27-12-2025 | Published Online: 28-12-2025

### Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran strategis sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang mengelola anggaran publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan kompleksitas pengelolaan keuangan yang tinggi menghadapi tantangan dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Realisasi anggaran Provinsi Jawa Barat yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya menuntut adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian yang kuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan, inefisiensi, serta praktik korupsi yang dapat merugikan kepentingan publik [1].

Sistem pengendalian internal menjadi instrumen vital dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan pada sektor publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap instansi pemerintah wajib menerapkan pengendalian internal yang efektif untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi sistem pengendalian internal yang komprehensif

mencakup lima komponen utama yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Kelima komponen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan ekosistem pengendalian yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi [2].

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan manifestasi dari tanggung jawab OPD dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Konsep akuntabilitas tidak hanya sebatas pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga mencakup dimensi transparansi, responsivitas, dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), terdapat hubungan prinsipal-agen antara masyarakat sebagai pemilik sumber daya dengan pemerintah daerah sebagai pengelola, yang berpotensi menimbulkan asimetri informasi dan konflik kepentingan. Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme untuk meminimalkan *agency problem* tersebut dengan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan kepentingan prinsipal dan peraturan yang berlaku [3].

Berbagai penelitian terdahulu telah mengeksplorasi keterkaitan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Penelitian Lestari menemukan bahwa efektivitas penerapan sistem pengendalian internal

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan lingkungan pengendalian sebagai komponen yang paling dominan [4]. Studi tersebut menggarisbawahi pentingnya komitmen pimpinan dan budaya organisasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengendalian internal. Sementara itu, penelitian Puspitawati dan Effendy mengidentifikasi bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal menjadi salah satu faktor utama penyebab rendahnya akuntabilitas keuangan daerah, yang tercermin dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa ketidakpatuhan terhadap regulasi dan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan [5]. Lebih lanjut, riset Anas et al. menunjukkan bahwa penilaian risiko dan kegiatan pengendalian memiliki korelasi positif dengan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD di Jawa Tengah [6].

Fenomena empiris yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi dengan implementasi sistem pengendalian internal pada OPD. Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir masih mengungkapkan berbagai permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian internal, seperti ketidakcukupan dokumentasi transaksi, lemahnya pengawasan atas aset daerah, serta tidak memadainya pemisahan fungsi dalam proses pengelolaan keuangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi dan internalisasi sistem pengendalian internal dalam praktik organisasi masih menghadapi hambatan struktural maupun kultural. Hambatan tersebut dapat bersumber dari keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kurangnya komitmen pimpinan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta resistensi terhadap perubahan dalam budaya organisasi [7].

Dimensi akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD tidak dapat dilepaskan dari dinamika tata kelola pemerintahan daerah yang semakin kompleks. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas terus meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran publik dan kemudahan akses informasi melalui platform digital. OPD dituntut tidak hanya untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, tetapi juga mampu menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan secara substansif kepada publik. Dalam konteks ini, sistem pengendalian internal berperan sebagai infrastruktur yang mendukung terciptanya akuntabilitas vertikal (kepada pemerintah pusat dan lembaga pengawas) maupun akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya). Penelitian Astuti et al. menegaskan bahwa sistem pengendalian internal yang robust dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah [8].

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan akademis dan praktis yang mendasar. Pertama, meskipun telah banyak studi yang mengkaji hubungan antara sistem pengendalian internal dan akuntabilitas keuangan sektor publik, mayoritas penelitian tersebut dilakukan pada konteks pemerintah daerah secara umum atau pada provinsi lain di Indonesia. Karakteristik geografis, demografis, ekonomi, dan kelembagaan Provinsi Jawa Barat yang unik memerlukan kajian spesifik untuk memahami dinamika hubungan kedua variabel tersebut dalam konteks lokal yang khas. Kedua, perkembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terus mengalami pembaruan, sehingga diperlukan penelitian terkini yang dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi regulasi tersebut pada level operasional OPD. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Signifikansi penelitian ini juga terletak pada urgensi memperkuat tata kelola keuangan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan sebagai penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) yang signifikan bagi perekonomian nasional memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang kuat untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Kelemahan dalam sistem pengendalian internal tidak hanya berdampak pada rendahnya akuntabilitas, tetapi juga dapat menghambat efektivitas program pembangunan dan pelayanan publik yang pada akhirnya merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam memperkuat basis pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui lensa sistem pengendalian internal.

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: Pertama, bagaimana tingkat implementasi sistem pengendalian internal pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat? Kedua, bagaimana tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat? Ketiga, bagaimana hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat? Melalui tiga pertanyaan penelitian tersebut, studi ini akan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam keterkaitan antara sistem pengendalian internal sebagai mekanisme pengawasan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai output dari tata kelola keuangan yang baik pada konteks OPD Provinsi Jawa Barat.

## Metodologi Penelitian

### 2.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional untuk mengkaji keterkaitan antara sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel secara statistik dengan tingkat objektivitas yang tinggi. Metode survei digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

### 2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 47 OPD, meliputi dinas, badan, dan sekretariat daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria OPD yang memiliki anggaran di atas 50 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024 dan telah beroperasi minimal tiga tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 35 OPD sebagai sampel penelitian. Responden dalam setiap OPD terdiri dari Kepala Sub Bagian Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan staf pengelola keuangan yang memiliki pengalaman minimal dua tahun, sehingga total responden yang ditargetkan berjumlah 105 orang dengan asumsi tiga responden per OPD.

### 2.3 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal yang diukur menggunakan lima dimensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan yang diukur melalui empat dimensi meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Kedua variabel dioperasionalisasi menjadi indikator-indikator terukur yang dituangkan dalam instrumen kuesioner dengan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju [9].

### 2.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring dan luring kepada responden terpilih dengan periode pengumpulan selama empat minggu. Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan teknik korelasi *product moment* dan *Cronbach's Alpha* dengan standar nilai koefisien minimal 0,60. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian, serta analisis regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan

keuangan [10]. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26 dengan tingkat signifikansi 5 persen untuk pengujian hipotesis.

## Hasil dan Diskusi

### 3.1 Tingkat Implementasi Sistem Pengendalian Internal pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Pengukuran tingkat implementasi sistem pengendalian internal pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui penilaian terhadap lima dimensi utama yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Berdasarkan hasil pengolahan data dari 98 responden yang berasal dari 35 OPD, diperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi implementasi sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tingkat pengembalian kuesioner mencapai 93,33 persen dari total 105 kuesioner yang disebar, menunjukkan antusiasme dan keseriusan responden dalam memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa dimensi lingkungan pengendalian memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,18 dari skala maksimal 5,00 dengan standar deviasi 0,62. Nilai ini mengindikasikan bahwa aspek lingkungan pengendalian yang mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai, serta pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah diimplementasikan dengan kategori baik pada mayoritas OPD. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari keseluruhan sistem pengendalian internal yang mempengaruhi efektivitas komponen-komponen lainnya [6]. Dimensi penilaian risiko memperoleh nilai rata-rata 3,94 dengan standar deviasi 0,71, menunjukkan bahwa proses identifikasi dan analisis risiko dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas dalam penetapan tujuan organisasi, identifikasi risiko secara komprehensif, analisis risiko yang sistematis, serta pengelolaan risiko perubahan.

Dimensi kegiatan pengendalian mencatat nilai rata-rata 4,05 dengan standar deviasi 0,68, yang mencerminkan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian telah ditetapkan dan dijalankan untuk memastikan arahan pimpinan dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pengendalian yang dinilai meliputi review atas kinerja, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan review indikator kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses, serta akuntabilitas dan dokumentasi yang memadai. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sebagian besar OPD telah menerapkan pemisahan fungsi yang jelas antara otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset, meskipun masih ditemukan beberapa kendala terkait dokumentasi transaksi yang belum sepenuhnya tertib dan sistematis [11].

Dimensi informasi dan komunikasi memperoleh nilai rata-rata 4,12 dengan standar deviasi 0,59, mengindikasikan bahwa sistem informasi dan komunikasi yang ada telah mendukung proses pengelolaan keuangan dengan baik melalui penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Komunikasi internal antar unit kerja maupun komunikasi eksternal dengan pihak-pihak terkait telah berjalan relatif efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dimensi pemantauan pengendalian internal mencatat nilai rata-rata 3,87 dengan standar deviasi 0,76, menunjukkan bahwa aktivitas pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah terhadap sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan. Pemantauan yang dilakukan meliputi pemantauan berkelanjutan dalam operasional sehari-hari, evaluasi terpisah melalui audit internal maupun review manajemen, serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Secara keseluruhan, variabel sistem pengendalian internal memperoleh nilai rata-rata gabungan sebesar 4,03, yang mengkategorikan implementasi sistem pengendalian internal pada OPD Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat baik namun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan terutama pada aspek pemantauan dan penilaian risiko.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Implementasi Sistem Pengendalian Internal

Dimensi	Mean	Std. Deviation	Kategori
Lingkungan Pengendalian	4,18	0,62	Baik
Penilaian Risiko	3,94	0,71	Baik
Kegiatan Pengendalian	4,05	0,68	Baik
Informasi dan Komunikasi	4,12	0,59	Baik
Pemantauan	3,87	0,76	Baik
<b>Rata-rata SPI</b>	<b>4,03</b>	<b>0,67</b>	<b>Baik</b>

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa variasi implementasi antar dimensi sistem pengendalian internal menunjukkan pola yang konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya mengenai tantangan implementasi SPIP pada instansi pemerintah daerah. Dimensi lingkungan pengendalian yang memperoleh skor tertinggi mengindikasikan bahwa aspek fundamental berupa komitmen pimpinan, integritas organisasi, dan struktur organisasi telah mendapat perhatian serius dari mayoritas OPD di Provinsi Jawa Barat. Komitmen pimpinan dalam menciptakan tone at the top yang kondusif bagi pengendalian internal menjadi faktor determinan yang mempengaruhi efektivitas keseluruhan sistem, sebagaimana dikemukakan bahwa lingkungan pengendalian merupakan fondasi yang mempengaruhi

komponen-komponen lainnya dalam sistem pengendalian internal [6].

Nilai standar deviasi yang relatif rendah pada dimensi lingkungan pengendalian yaitu 0,62 menunjukkan bahwa terdapat konsistensi persepsi antar responden mengenai kualitas implementasi dimensi ini di berbagai OPD. Konsistensi ini mencerminkan adanya standarisasi praktik tata kelola yang baik dalam hal penetapan nilai etika, pembentukan struktur organisasi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Namun demikian, nilai rata-rata 4,18 yang masih di bawah nilai maksimal 5,00 mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam hal internalisasi nilai-nilai integritas dan etika ke dalam budaya kerja sehari-hari, bukan hanya sebatas dokumen formal yang tercantum dalam code of conduct atau peraturan internal organisasi [12].

Dimensi penilaian risiko yang memperoleh nilai terendah kedua dengan rata-rata 3,94 dan standar deviasi tertinggi yaitu 0,71 mengindikasikan adanya disparitas kemampuan antar OPD dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan. Standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian OPD telah memiliki sistem penilaian risiko yang terstruktur dan komprehensif, sementara OPD lainnya masih melakukan penilaian risiko secara parsial dan kurang sistematis. Penilaian risiko yang efektif memerlukan kapasitas analitis yang kuat untuk dapat mengidentifikasi risiko inheren maupun risiko residual, menilai probabilitas dan dampak risiko, serta menetapkan strategi mitigasi yang tepat sesuai dengan risk appetite organisasi [13].

Kompleksitas dalam penilaian risiko juga dipengaruhi oleh dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah, termasuk perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta ekspektasi stakeholder yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang manajemen risiko menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi dimensi ini, sehingga diperlukan program capacity building yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan analisis risiko pada seluruh jajaran pengelola keuangan di OPD, mengingat bahwa penilaian risiko dan kegiatan pengendalian memiliki korelasi positif dengan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan [13].

Dimensi kegiatan pengendalian dengan nilai rata-rata 4,05 menunjukkan bahwa sebagian besar OPD telah menetapkan dan menjalankan prosedur pengendalian operasional dengan baik, meskipun masih terdapat variasi kualitas implementasi sebagaimana tercermin dari standar deviasi 0,68. Kegiatan pengendalian yang mencakup sepuluh elemen utama mulai dari review kinerja hingga akuntabilitas dan dokumentasi telah diimplementasikan dengan tingkat kepatuhan yang cukup baik. Namun, observasi



lapangan menunjukkan bahwa beberapa prosedur pengendalian masih dijalankan secara ritualistik tanpa pemahaman mendalam mengenai tujuan dan manfaat dari setiap prosedur tersebut, yang berpotensi menurunkan efektivitas pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan [6].

Pemisahan fungsi antara otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kegiatan pengendalian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya fraud atau error yang tidak terdeteksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas OPD telah menerapkan pemisahan fungsi ini dengan baik, meskipun pada beberapa OPD dengan keterbatasan sumber daya manusia masih ditemukan adanya perangkapan fungsi yang dapat melemahkan sistem pengendalian. Dokumentasi transaksi yang memadai juga menjadi aspek penting dalam kegiatan pengendalian, namun masih ditemukan kendala terkait ketidaklengkapan dokumentasi pendukung transaksi serta keterlambatan dalam proses pencatatan dan pelaporan, sebagaimana sering menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK terhadap LKPD [12].

Dimensi informasi dan komunikasi dengan nilai rata-rata 4,12 dan standar deviasi terendah yaitu 0,59 menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan telah berfungsi dengan baik dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Implementasi sistem informasi manajemen daerah yang terintegrasi pada sebagian besar OPD telah meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengolahan data keuangan, mengurangi redundansi data, serta memfasilitasi pelaporan yang lebih transparan. Komunikasi internal antar unit kerja dalam OPD maupun komunikasi eksternal dengan pihak terkait seperti BPKAD, Inspektorat, dan BPK juga telah berjalan dengan relatif lancar melalui berbagai saluran komunikasi formal maupun informal [12].

Namun demikian, tantangan dalam dimensi informasi dan komunikasi masih tetap ada terutama terkait dengan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem. Beberapa responden mengungkapkan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem kadang kala tidak sepenuhnya dapat diandalkan karena adanya kesalahan input data atau ketidaksempurnaan dalam desain sistem. Kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan bagi operator sistem serta peningkatan kualitas sistem informasi melalui pembaruan dan penyempurnaan secara berkala menjadi agenda penting untuk memastikan bahwa dimensi informasi dan komunikasi dapat terus mendukung efektivitas sistem pengendalian internal secara keseluruhan [3].

Dimensi pemantauan pengendalian internal yang memperoleh nilai terendah dengan rata-rata 3,87 dan standar deviasi tertinggi yaitu 0,76 mencerminkan bahwa aktivitas monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal belum dilakukan secara

optimal dan konsisten di seluruh OPD. Pemantauan yang efektif memerlukan kombinasi antara pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh manajemen dalam operasional sehari-hari dengan evaluasi terpisah yang dilakukan oleh auditor internal atau pihak independen secara periodik. Keterbatasan kapasitas Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah dalam melakukan fungsi audit dan reviu terhadap seluruh OPD secara komprehensif menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya skor dimensi ini [14].

### 3.2 Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD Provinsi Jawa Barat diukur melalui empat dimensi utama yang meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan. Pengukuran keempat dimensi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana OPD telah melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum memperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,26 dengan standar deviasi 0,58, mengindikasikan bahwa mayoritas OPD telah menjalankan pengelolaan keuangan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, menghindari penyalahgunaan jabatan, serta mematuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Dimensi ini mencakup aspek-aspek seperti ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pencegahan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran.

Dimensi akuntabilitas proses mencatat nilai rata-rata 4,08 dengan standar deviasi 0,64, menunjukkan bahwa prosedur dan mekanisme dalam pengelolaan keuangan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Akuntabilitas proses meliputi kesesuaian prosedur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, ketepatan waktu dalam penyusunan laporan, serta kepatuhan terhadap sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa akuntabilitas proses menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kredibilitas pengelolaan keuangan sektor publik [15]. Dimensi akuntabilitas program memperoleh nilai rata-rata 3,95 dengan standar deviasi 0,72, mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan masih dapat ditingkatkan. Akuntabilitas program mencakup penetapan indikator kinerja yang jelas, pengukuran capaian kinerja secara objektif, serta pelaporan hasil pelaksanaan program yang komprehensif.

Dimensi akuntabilitas kebijakan mencatat nilai rata-rata 3,88 dengan standar deviasi 0,79, merupakan dimensi dengan nilai terendah

dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pengelolaan keuangan, termasuk alasan pemilihan alternatif kebijakan, analisis dampak kebijakan, serta transparansi dalam pengambilan keputusan masih perlu mendapat perhatian lebih serius. Secara keseluruhan, variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan memperoleh nilai rata-rata gabungan sebesar 4,04, mengkategorikan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD Provinsi Jawa Barat berada pada level baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar OPD telah menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan terutama dalam dimensi akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas program [13].

Analisis lebih lanjut terhadap karakteristik responden menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan cenderung lebih tinggi pada OPD dengan anggaran yang lebih besar dan memiliki kompleksitas kegiatan yang tinggi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa OPD dengan karakteristik tersebut umumnya memiliki sistem dan prosedur yang lebih terstruktur, sumber daya manusia yang lebih kompeten, serta mendapat perhatian lebih intensif dari unit pengawasan internal maupun eksternal. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa ukuran organisasi dan kompleksitas operasional memiliki hubungan positif dengan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan [16].

Tabel 2. Statistik Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Dimensi	Mean	Std. Deviation	Kategori
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	4,26	0,58	Sangat Baik
Akuntabilitas Proses	4,08	0,64	Baik
Akuntabilitas Program	3,95	0,72	Baik
Akuntabilitas Kebijakan	3,88	0,79	Baik
<b>Rata-rata Akuntabilitas</b>	<b>4,04</b>	<b>0,68</b>	<b>Baik</b>

### 3.3 Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Pengujian hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dilakukan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan statistik yang valid. Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,128 yang lebih besar dari alpha 0,05, menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,217 yang lebih besar dari 0,05, mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Uji linearitas menunjukkan nilai signifikansi pada *linearity* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05,

membuktikan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Hasil analisis regresi linier sederhana menghasilkan persamaan regresi  $Y = 0,847 + 0,783X$ , dimana Y merupakan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan dan X merupakan variabel sistem pengendalian internal. Konstanta sebesar 0,847 mengindikasikan bahwa apabila tidak terdapat implementasi sistem pengendalian internal atau nilai variabel sistem pengendalian internal sama dengan nol, maka nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan akan sebesar 0,847. Koefisien regresi sebesar 0,783 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada implementasi sistem pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 0,783 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien regresi yang positif ini membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang berarti semakin baik implementasi sistem pengendalian internal maka akan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD [17].

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,642, yang berarti bahwa variabel sistem pengendalian internal mampu menjelaskan variasi perubahan pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 64,2 persen, sedangkan sisanya sebesar 35,8 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki peran yang sangat substansial dalam membentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD. Variabel lain yang berpotensi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan namun tidak diteliti dalam penelitian ini antara lain kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, budaya organisasi, sistem teknologi informasi, serta pengawasan eksternal dari aparat pengawasan fungsional. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal merupakan prediktor signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan kontribusi yang besar [18].

Pengujian hipotesis menggunakan uji t menghasilkan nilai t hitung sebesar 14,762 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5 persen dan derajat kebebasan 96 sebesar 1,985, maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $14,762 > 1,985$ ), sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD Provinsi Jawa Barat. Temuan ini mengkonfirmasi teori yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan instrumen penting

dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik karena menyediakan struktur, prosedur, dan mekanisme yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan regulasi dan mencapai tujuan organisasi [19].

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Model	Koefisien	t hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	0,847	2,341	0,021	Signifikan
Sistem Pengendalian Internal (X)	0,783	14,762	0,000	Signifikan
R Square	0,642			
Adjusted Square	R 0,638			
F hitung	217,915		0,000	Signifikan

Pembahasan lebih mendalam terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi sistem pengendalian internal memberikan kontribusi yang berbeda terhadap pembentukan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dimensi lingkungan pengendalian yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi berperan fundamental dalam menciptakan budaya organisasi yang mendukung praktik akuntabilitas. Komitmen pimpinan terhadap integritas, etika, dan kompetensi menjadi fondasi yang mempengaruhi bagaimana seluruh anggota organisasi menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Dimensi penilaian risiko berkontribusi terhadap akuntabilitas melalui identifikasi dan mitigasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pengelolaan keuangan, sehingga organisasi dapat mengantisipasi dan mengelola potensi penyimpangan sebelum terjadi.

Dimensi kegiatan pengendalian yang mencakup berbagai kebijakan dan prosedur operasional memastikan bahwa setiap transaksi keuangan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemisahan fungsi yang jelas, otorisasi yang tepat, serta pencatatan yang akurat merupakan elemen-elemen krusial yang secara langsung mendukung terwujudnya akuntabilitas. Dimensi informasi dan komunikasi berperan dalam menyediakan data dan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban, sekaligus memfasilitasi komunikasi yang efektif antar unit kerja maupun dengan pihak eksternal. Dimensi pemantauan pengendalian internal berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian secara berkelanjutan dan memastikan bahwa kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi segera ditindaklanjuti, sehingga sistem pengendalian internal terus mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas [14].

Temuan penelitian ini memberikan implikasi teoretis yang memperkuat teori keagenan dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik. Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme yang meminimalkan asimetri informasi dan konflik kepentingan antara prinsipal (masyarakat) dan agen

(pemerintah daerah), sehingga memfasilitasi akuntabilitas agen kepada prinsipal. Implementasi sistem pengendalian internal yang efektif menciptakan transparansi, mengurangi peluang terjadinya penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus memperkuat implementasi sistem pengendalian internal melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan komitmen pimpinan, perbaikan sistem dan prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya mengukur persepsi responden terhadap implementasi sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui instrumen kuesioner, sehingga kemungkinan terdapat bias subjektivitas dalam penilaian. Penelitian selanjutnya dapat mengkombinasikan metode survei dengan metode observasi langsung atau analisis dokumen untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif. Kedua, penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional* yang mengambil data pada satu waktu tertentu, sehingga tidak dapat menangkap dinamika perubahan implementasi sistem pengendalian internal dan dampaknya terhadap akuntabilitas dari waktu ke waktu. Penelitian longitudinal di masa mendatang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan kausal antara kedua variabel. Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel utama tanpa memasukkan variabel moderasi atau mediasi yang dapat memperkaya analisis hubungan antar variabel. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi peran variabel seperti kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, atau budaya organisasi sebagai variabel moderasi atau mediasi dalam hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Analisis lanjutan terhadap data penelitian mengungkapkan beberapa pola menarik yang perlu dicermati lebih mendalam. Pertama, terdapat variasi tingkat implementasi sistem pengendalian internal antar OPD yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kontekstual. OPD dengan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti dinas kesehatan dan dinas pendidikan cenderung memiliki tingkat implementasi yang lebih tinggi dibandingkan OPD dengan fungsi penunjang administratif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa OPD pelayanan publik mendapat tekanan dan pengawasan yang lebih intensif dari masyarakat dan media, sehingga memiliki motivasi lebih besar untuk menerapkan pengendalian yang ketat sesuai dengan nilai rata-rata sistem pengendalian internal yang mencapai 4,03 pada kategori baik [12].

Perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa pendekatan implementasi sistem pengendalian internal perlu disesuaikan dengan konteks operasional masing-masing OPD agar dapat berfungsi optimal. Temuan penelitian juga mengidentifikasi bahwa masa kerja pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan memiliki korelasi positif dengan pemahaman dan implementasi sistem pengendalian internal. Responden dengan pengalaman kerja di atas lima tahun menunjukkan persepsi yang lebih baik terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dibandingkan responden dengan pengalaman kerja di bawah tiga tahun, terutama pada dimensi lingkungan pengendalian yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,18 dengan standar deviasi 0,62 [11].

Fenomena ini mengindikasikan pentingnya transfer pengetahuan dan pengalaman antar generasi pegawai dalam organisasi. Program mentoring dan pendampingan bagi pegawai baru perlu diperkuat untuk mempercepat kurva pembelajaran dan memastikan kontinuitas implementasi sistem pengendalian internal yang efektif. Dimensi penilaian risiko yang memperoleh nilai relatif lebih rendah dengan rata-rata 3,94 dan standar deviasi 0,71 menunjukkan bahwa OPD masih menghadapi kendala dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko secara sistematis dan komprehensif (Purba, Agusti, & Rofika, 2021).

Wawancara informal dengan beberapa responden mengungkapkan bahwa proses penilaian risiko seringkali dilakukan secara formalitas untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa benar-benar diintegrasikan dalam pengambilan keputusan manajemen. Penilaian risiko yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang lingkungan internal dan eksternal organisasi, kemampuan analisis yang baik, serta komitmen untuk menggunakan hasil penilaian risiko sebagai dasar perencanaan strategis. Pelatihan berkelanjutan tentang manajemen risiko dan pengembangan tools penilaian risiko yang praktis dan mudah digunakan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas dimensi ini, mengingat kesenjangan nilai antara dimensi penilaian risiko dengan dimensi lingkungan pengendalian mencapai 0,24 poin [18].

Dimensi pemantauan pengendalian internal yang memperoleh skor terendah dengan nilai rata-rata 3,87 dan standar deviasi 0,76 mengindikasikan bahwa aktivitas evaluasi dan monitoring belum dilakukan secara optimal [19]. Pemantauan yang efektif memerlukan mekanisme *reviu* berkala, audit internal yang independen, serta sistem pelaporan yang memfasilitasi deteksi dini atas kelemahan pengendalian. Beberapa OPD menghadapi keterbatasan sumber daya untuk melakukan aktivitas pemantauan secara konsisten, terutama dalam hal ketersediaan auditor internal yang kompeten dan independen.

Peran Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal perlu diperkuat melalui

peningkatan kapasitas dan independensi untuk dapat melakukan fungsi pemantauan yang efektif terhadap sistem pengendalian internal di seluruh OPD. Dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan, dimensi akuntabilitas kebijakan yang memperoleh nilai terendah dengan rata-rata 3,88 dan standar deviasi 0,79 mencerminkan tantangan dalam menciptakan transparansi proses pengambilan keputusan [13].

Akuntabilitas kebijakan menuntut tidak hanya pertanggungjawaban atas hasil keputusan, tetapi juga transparansi atas proses, pertimbangan, dan alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi OPD seringkali melibatkan *trade-off* antar berbagai kepentingan dan keterbatasan sumber daya, sehingga proses pengambilan keputusan tidak selalu dapat dikomunikasikan secara sederhana kepada publik. Pengembangan mekanisme konsultasi publik dan platform transparansi kebijakan dapat membantu meningkatkan dimensi akuntabilitas kebijakan ini, terutama mengingat perbedaan nilai yang cukup signifikan dengan dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum yang mencapai 4,26 [16].

Hasil analisis korelasi antar dimensi sistem pengendalian internal dengan dimensi akuntabilitas pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian memiliki korelasi paling kuat dengan akuntabilitas kejujuran dan hukum. Hal ini logis karena lingkungan pengendalian yang kondusif dengan nilai 4,18 menciptakan budaya integritas dan kepatuhan yang menjadi fondasi akuntabilitas kejujuran dan hukum dengan nilai 4,26 [17]. Kegiatan pengendalian dengan nilai rata-rata 4,05 dan standar deviasi 0,68 memiliki korelasi kuat dengan akuntabilitas proses yang memperoleh nilai 4,08 dengan standar deviasi 0,64, yang dapat dijelaskan bahwa prosedur dan mekanisme pengendalian operasional secara langsung mempengaruhi ketaatan terhadap prosedur dalam proses pengelolaan keuangan [14].

Penilaian risiko berkorelasi kuat dengan akuntabilitas program karena identifikasi dan mitigasi risiko yang baik memfasilitasi pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan, meskipun kedua dimensi ini memperoleh nilai yang relatif lebih rendah yaitu 3,94 untuk penilaian risiko dan 3,95 untuk akuntabilitas program dengan standar deviasi masing-masing 0,71 dan 0,72. Pengujian lebih lanjut terhadap pengaruh karakteristik OPD menunjukkan bahwa ukuran anggaran dan kompleksitas kegiatan berpengaruh terhadap kekuatan hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

OPD dengan anggaran besar cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang lebih formal dan terstruktur, yang berpengaruh lebih signifikan terhadap akuntabilitas dibandingkan OPD dengan anggaran lebih kecil, sebagaimana tercermin dari koefisien determinasi sebesar 0,642 yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal



mampu menjelaskan 64,2 persen variasi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa skalabilitas dan adaptabilitas sistem pengendalian internal perlu dipertimbangkan dalam pengembangannya agar dapat diterapkan secara efektif pada berbagai skala dan kompleksitas organisasi.

Implementasi teknologi informasi dalam sistem pengendalian internal menunjukkan perkembangan yang beragam antar OPD. Beberapa OPD telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi dengan fitur pengendalian otomatis seperti approval workflow dan audit trail, sementara OPD lainnya masih mengandalkan sistem manual atau semi-manual. Pemanfaatan teknologi informasi terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian melalui otomatisasi proses, pengurangan human error, serta penyediaan informasi real-time untuk pengambilan keputusan, terutama dalam mendukung dimensi informasi dan komunikasi yang telah memperoleh nilai baik dengan rata-rata 4,12 dan standar deviasi 0,59 [12].

Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan pengembangan kompetensi digital pegawai menjadi prioritas strategis untuk mendukung modernisasi sistem pengendalian internal. Aspek budaya organisasi juga muncul sebagai faktor penting yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal dalam mendorong akuntabilitas. OPD dengan budaya organisasi yang menekankan transparansi, pembelajaran berkelanjutan, dan perbaikan terus-menerus menunjukkan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan OPD dengan budaya yang lebih hierarkis dan tertutup, sebagaimana tercermin dari nilai rata-rata akuntabilitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan yang mencapai 4,04 [12].

Transformasi budaya organisasi memerlukan waktu dan komitmen jangka panjang dari seluruh jajaran organisasi, terutama dari tingkat pimpinan yang menjadi role model bagi anggota organisasi lainnya. Koordinasi antar unit kerja dalam implementasi sistem pengendalian internal juga menjadi faktor kritis yang menentukan efektivitas keseluruhan sistem. Pengelolaan keuangan melibatkan berbagai unit kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, sehingga memerlukan koordinasi yang erat dan komunikasi yang efektif sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yang menghasilkan nilai  $t$  hitung sebesar 14,762 dengan signifikansi 0,000, membuktikan pengaruh positif dan signifikan [18].

Fragmentasi atau silo antar unit dapat menghambat aliran informasi dan melemahkan pengendalian keseluruhan. Mekanisme koordinasi yang terstruktur seperti rapat koordinasi rutin dan sistem pelaporan terintegrasi perlu diperkuat untuk memastikan sinergi antar komponen sistem pengendalian internal, mengingat persamaan regresi  $Y = 0,847 + 0,783X$  menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada implementasi sistem

pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 0,783 satuan [14].

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yang menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pertama, tingkat implementasi sistem pengendalian internal pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,03 dari skala 5,00. Dimensi lingkungan pengendalian memperoleh nilai tertinggi dengan rata-rata 4,18, sedangkan dimensi pemantauan pengendalian internal memperoleh nilai terendah dengan rata-rata 3,87. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fondasi sistem pengendalian internal telah kuat, namun aspek evaluasi dan pemantauan berkelanjutan masih memerlukan perhatian lebih intensif untuk memastikan efektivitas sistem secara keseluruhan. Kedua, tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD Provinsi Jawa Barat juga berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,04. Dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum mencatat nilai tertinggi dengan rata-rata 4,26, sementara dimensi akuntabilitas kebijakan memperoleh nilai terendah dengan rata-rata 3,88. Temuan ini mengindikasikan bahwa OPD telah menjalankan pengelolaan keuangan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan kepatuhan hukum, namun transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan kebijakan masih dapat ditingkatkan.

Ketiga, hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD Provinsi Jawa Barat dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,783 dan koefisien determinasi sebesar 0,642. Temuan ini memberikan implikasi praktis bahwa peningkatan kualitas implementasi sistem pengendalian internal akan berkontribusi secara substansial terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan penguatan sistem pengendalian internal melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, penguatan komitmen pimpinan terhadap implementasi pengendalian internal, perbaikan sistem dan prosedur operasional, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian, serta intensifikasi aktivitas pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan seperti kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, komitmen organisasi, serta peran teknologi informasi sebagai variabel moderasi atau mediasi dalam hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

## Reference

- [1] A. Purwati *et al.*, “Akuntansi sektor publik,” 2023, *PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA*.
- [2] R. Herlina, T. Taufik, and A. Nasir, ““Transparency, Competency, Financial Accounting System, The Accountability of Regional Financial Management, Implementation of The Government Internal Control System,”” *J. Econ. Bus. Account.*, vol. 4, no. 2, pp. 419–433, 2021.
- [3] S. Abdullah and A. Halim, “Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah,” *J. Pengur.*, 2006, [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/publication/273257684\\_Hubungan\\_dan\\_Masalah\\_Keagenan\\_di\\_Pemerintahan\\_Daerah](https://www.researchgate.net/publication/273257684_Hubungan_dan_Masalah_Keagenan_di_Pemerintahan_Daerah)
- [4] S. D. Lestari, “Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Dan Provinsi Jawa Barat),” 2015, [Online]. Available: <https://repository.widyatama.ac.id/items/a2cea8c5-7eb1-434f-8af6-35992ffaa87d>
- [5] L. Puspitawati and M. M. Effendy, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan,” *J. Agreg. Aksi Reformasi Gov. dalam Demokr.*, vol. 9, no. 1, pp. 43–58, 2021, doi: 10.34010/agregasi.v9i1.4372.
- [6] M. Anas, Forijati, and D. Lianawat, “Peran Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kediri,” *Semin. Nas. Manajemen, Ekon. dan Akuntansi Fak. Ekon. dan Bisnis UNP Kediri*, no. September, pp. 318–329, 2020.
- [7] Agustawan, A. M. Putri, and Y. Saputra, “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Audit Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan,” *Account. Manag. J.*, vol. 5, no. 2, pp. 17–28, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.33086/amj.v5i2.1926>
- [8] M. Astuti, R. Wulandari, and S. W. Setyowati, “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” *J. Rimba Ris. Ilmu Manaj. Bisnis dan Akunt.*, vol. 1, no. 4, pp. 310–330, 2023, doi: 10.61132/rimba.v1i4.317.
- [9] Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,” *Alf. Bandung*, 2022.
- [10] I. Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 23*. 2016.
- [11] K. D. Jurnalistiati and N. Maryani, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat,” *COSTING J. Econ. Bus. Account.*, vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2025.
- [12] O. D. S. Sari and M. T. Hidayat, “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Kota Surabaya,” *J. Ris. Akunt. Keuang.*, vol. 11, no. 1, pp. 49–59, 2025, doi: <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/4703>.
- [13] A. P. Kharisma and H. F. Rahma, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi),” *J. Akunt. Dan Keuang. Drh.*, vol. 18, no. 1, pp. 19–28, 2023, doi: 10.52062/jaked.v18i1.3039.
- [14] N. A. Yogasworo and S. Suprayitno, “Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Informasi pada Sistem Informasi Keuangan Daerah,” *Equity*, vol. 22, no. 2, pp. 109–138, 2020, doi: 10.34209/equ.v22i2.1249.
- [15] M. Purba, R. Agusti, R. Rofika, P. S. Akuntansi, and U. Riau, “Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah,” *Curr. J. Kaji. Akunt. dan Bisnis Terkini*, vol. 2, no. 3, pp. 418–434, 2021, doi: 10.31258/jc.2.3.418-434.
- [16] Badewin, R. Elizabeth, A. Rusmardiana, G. Rely, and L. Judijanto, “Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia,” *J. Ilm. Akunt. Kesatuan*, vol. 13, no. 4, pp. 831–842, 2025, doi: 10.37641/jiakes.v13i4.3642.
- [17] S. N. Fhadillah and I. Yudianto, “The Influence of Application Government Internal Control System, Asset Management and Human Resources Competencies to Financial Accountability of Bandung Municipal Government,” *J. Account. Audit. Bus.*, vol. 1, no. 1, p. 62, 2018, doi: 10.24198/jaab.v1i1.18796.
- [18] E. Dewata, H. Jauhari, and M. El Auda, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah,” *J. Ris. Terap. Akunt.*, vol. 5, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5747284>.
- [19] W. Idawati and L. Eleonora, “Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan,” *Equity*, vol. 22, no. 2, pp. 153–172, 2020, doi: 10.34209/equ.v22i2.1367.